

## PENGARUH SAP, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Hartono<sup>1</sup>, Ramdany<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIE Muhammadiyah Jakarta, har.somacom@gmail.com

<sup>2</sup>STIE Muhammadiyah Jakarta, ramdany2012@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Efektivitas Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Data bersumber dari kuesioner dan diolah menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAP, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SDM secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Kualitas Laporan Keuangan

### ABSTRACT

*This study aims to measure the effect of Government Accounting Standards (GAS), Effectiveness of Internal Control, Competence of Human Resources (HR) on the Quality of Financial Statements. Data sourced from questionnaires and processed using multiple regression analysis. The results showed that GAS, the effectiveness of the Government's Internal Control System, HR partially and simultaneously had a significant effect on the quality of financial statements.*

**Keywords:** Government Accounting Standards, Effectiveness of Government Internal Control Systems, Competency of Human Resources, Quality of Financial Report

Naskah diterima: 07-04-2020, Naskah dipublikasikan: 30-04-2020

### PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di Pusat maupun Daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2012:18).

Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum, menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik (Soimah, 2014:2). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pada tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan di 87 Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Bendahara Umum Negara (BUN). Perkembangan opini LKKL/LKBUN tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Opini Laporan Keuangan KL dan BUN Tahun 2013-2017**

Opini	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	65	62	56	74	80
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	19	18	26	8	6
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	3	7	4	6	2
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	87	86	88	88

Sumber: www.bpk.go.id (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat kenaikan opini pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yang terjadi pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga. Pada tahun 2016, entitas yang memperoleh WTP sebanyak 74 entitas (84,09%), WDP sebanyak 8 entitas (9,09%), dan TMP sebanyak 6 entitas (6,82%), sedangkan pada tahun 2017 terjadi kenaikan kualitas opini dimana entitas yang memperoleh WTP sebanyak 80 entitas (90,91%), WDP sebanyak 6 entitas (6,82%), dan TMP sebanyak 2 entitas (2,27%). Mayoritas opini yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga adalah WTP, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah pusat sudah baik (Sumber: IHPS II BPK RI Tahun 2017). Namun, terdapat fenomena menarik tentang opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang diberikan oleh BPK kepada 2 entitas, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut atas Laporan Keuangan tahun 2016 dan 2017. Berikut adalah daftar opini audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari tahun 2013-2017.

**Tabel 2**  
**Opini Laporan Keuangan Kementerian KKP**

Tahun	Opini BPK
2013	WTP DPP
2014	WTP DPP
2015	WTP
2016	TMP
2017	TMP

Sumber: www.bpk.go.id (data diolah)

Laporan keuangan pemerintah wajib memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010). Laporan keuangan pemerintah kemudian diberikan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah juga wajib memenuhi karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Fenomena mengenai permasalahan kualitas laporan keuangan Pemerintah perlu dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya penerapan SAP dalam penyusunan Laporan Keuangan (Udiyanti, 2014). Penerapan SAP yang tepat dan tingkat pemahaman yang baik oleh pengelola keuangan pada Instansi Pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan selain dipengaruhi oleh tingkat penerapan SAP juga dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern yang berlaku di Pemerintah. Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi. Efektivitas sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit sehingga dapat mewujudkan keandalan laporan keuangan.

Pengendalian Internal bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi termasuk kualitas laporan keuangan, mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Diharapkan dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan mudah dalam mengendalikan dan mengawasi jalannya operasional organisasi.

Kualitas laporan keuangan yang memenuhi unsur kualitatif dan kuantitatif akan menghasilkan informasi yang andal. Efektivitas pengendalian internal yang memadai akan berimplikasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku sehingga akhirnya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi (Udiyanti 2014) dan berimplikasi pada kualitas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (Bastian, 2010:51). SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Sudarmanto, 2009:76). Suatu sistem yang sebaik akan sia-sia bila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai. Kualitas SDM dapat diukur dengan tingkat pendidikan, pengalaman dan pelatihan (Indriasih, 2014), pengetahuan, keterampilan dan perilaku (Wyatt dalam Ruki, 2003:106).

SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SAP dan SPIP adalah manusia. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan SDM yang memiliki kompetensi serta menguasai akuntansi pemerintahan (Simanjuntak, 2005:72). Selanjutnya Bastian (2010:55) juga menegaskan bahwa kompetensi SDM aparatur dalam penyusunan laporan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Pilander (2018) menyatakan bahwa secara empiris penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Kotamobagu.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan PP 71/2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri 12 Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) yaitu : (1) PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan, (2) PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, (3) PSAP 03: Laporan Arus Kas, (4) PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan, (5) PSAP 05: Akuntansi Persediaan, (6) PSAP 06: Akuntansi Investasi, (7) PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap, (8) PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, (9) PSAP 09: Akuntansi Kewajiban, (10) PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, (11) PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasi, dan (12) PSAP 12: Laporan Operasional.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi, maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) tentang SPIP menyatakan bahwa "Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” SPIP terdiri dari unsur-unsur: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kompetensi sumber daya manusia menurut Badan Kepegawaian Negara yang dikutip dari Sudarmanto (2015:49) adalah “Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara professional, efektif dan efisien”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN dalam rangka pengembangan karir PNS. Pengukuran kompetensi ASN dalam pengembangan karir PNS antara lain: (1) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis, (2) kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan (3) kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

PP 71/2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2015) karakteristik kualitatif laporan keuangan agar berkualitas sehingga berguna bagi pemakai wajib memenuhi unsur pokok yaitu : (1) dapat dipahami; (2) relevan; (3) keandalan; dan (4) dapat diperbandingkan.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) wajib mengacu PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Oleh karena itu SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dan pedoman dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berbanding searah (linear). Hal tersebut dinyatakan dalam PP 71/2010 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2017) menyimpulkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Munasyir (2015) menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2018) menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H<sub>1</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian di Kelautan dan Perikanan.

### **Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Keterkaitan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan Pemerintah diperlukan proses dan tahap-tahap yang wajib dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi tingkat efektifitas Sistem Pengendalian Intern yang dimiliki Pemerintah (Mahmudi, 2007:11; Ramdany, 2017b).

Penelitian Sudiarianti (2015) menyimpulkan bahwa penerapan SPIP berpengaruh positif pada kualitas LKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015), Ramdany (2017) menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Amarini (2018) membuktikan bahwa secara simultan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Medan.

H<sub>2</sub>: Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan) dipengaruhi oleh dua elemen yaitu kualitas informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya (Wahyono, 2014:12). Sumber daya manusia yang terlibat dalam menghasilkan informasi keuangan wajib memiliki tingkat keahlian yang memadai dan secara berkelanjutan menjaga tingkat keahliannya agar informasi keuangan tetap terjaga kualitasnya.

Penelitian Pilander (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Kotamobagu. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Yensi (2014) menunjukkan bahwa variabel kompetensi Sumber Daya Manusia terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

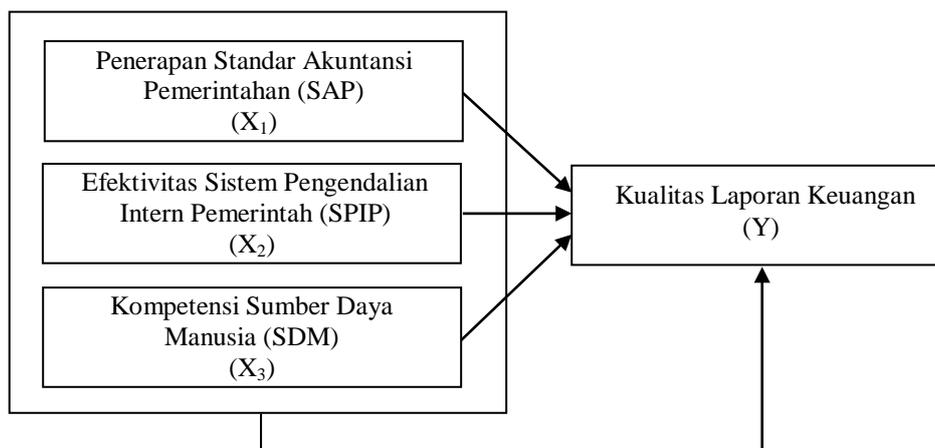
H<sub>3</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **Pengaruh Penerapan SAP , Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Selain pengujian secara parsial, penelitian ini juga melakukan pengujian secara simultan tentang pengaruh ketiga variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat, yaitu menguji pengaruh Penerapan SAP, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H<sub>4</sub>: Penerapan SAP, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat suatu kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel bebas dan terikat adalah sebagai berikut:



Gambar 1 – Model Kerangka Pemikiran

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model kuantitatif kausalitas bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori, berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Data penelitian menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diukur atau dihitung secara langsung yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2016:13).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 411 satker, dengan rincian sebagai berikut: Satker Pusat sebanyak 43, Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 148, Satker Dekonsentrasi sebanyak 197, maupun Satker Tugas Pembantuan sebanyak 23. Responden untuk masing-masing satker adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf yang menangani penyusunan laporan keuangan.

Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *nonprobability sampling*, dengan metode sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*). Metode ini dipilih karena pertimbangan Satker yang bersedia mengisi kuesioner. Jumlah sampel yang terkumpul 47 orang yang berasal dari jawaban kuesioner yang kembali atau diterima oleh peneliti sampai batas waktu yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke instansi dan membagikan kuesioner dalam format *link google form* untuk diisioleh satker dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Skala Jawaban (Skala Likert)

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (R)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2017)

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel terikat terhadap variabel bebas. Alat analisa data menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 24. Teknik analisis data yang dilakukan berupa Statistik Deskriptif;

Uji Kualitas Data yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas; Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi; Uji Regresi berupa Analisis Regresi Sederhana/Parsial dan Analisis Regresi Berganda; Uji Hipotesis yang digunakan menggunakan Uji  $t$  (*Product Moment Pearson*), Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji  $t$  dan Uji  $F$ .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data diperoleh koefisien pengaruh antara Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,618 satuan. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel bebas  $X_1$  (SAP) dengan variabel  $Y$  (Kualitas Laporan Keuangan) signifikan.

Hasil pengujian regresi linear parsial diperoleh persamaan  $\hat{Y} = 7,055 + 0,369X_1$ . Hal tersebut menunjukkan setiap perubahan 1 satuan variabel  $X_1$  (Penerapan SAP) akan meningkatkan variabel  $Y$  (Kualitas Laporan Keuangan) sebesar 0,369 satuan dan konstanta sebesar 7,055 satuan. Pengujian hipotesis diperoleh bahwa nilai  $\text{Sig.} = 0,000$  dan  $t_{\text{hitung}} = 5,268$  sedangkan  $t_{\text{tabel}} = 1,67$ . Karena nilai  $\text{Sig.} < 0,05$  dan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel  $X_1$  terhadap  $Y$ .

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Anggraini (2017) yang menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Munasyir (2015) menunjukkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2018) menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data koefisien pengaruh antara Efektivitas SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,573 satuan. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel bebas  $X_2$  (Efektivitas SPIP) dengan variabel  $Y$  (Kualitas Laporan Keuangan) signifikan.

Hasil pengujian regresi linear parsial diperoleh persamaan  $\hat{Y} = 15,021 + 0,250X_2$ . Hal tersebut menunjukkan setiap perubahan 1 satuan variabel  $X_2$  (Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) maka variabel  $Y$  (Kualitas Laporan Keuangan) akan meningkat sebesar 0,250 satuan konstanta 15,021 satuan. Pengujian hipotesis diperoleh bahwa nilai  $\text{Sig.} = 0,000$  dan  $t_{\text{hitung}} = 4,694$  sedangkan  $t_{\text{tabel}} = 1,67$ . Karena nilai  $\text{Sig.} < 0,05$  dan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan variabel bebas  $X_2$  terhadap  $Y$ .

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Sudiarianti (2015) yang menyimpulkan bahwa penerapan SPIP berpengaruh positif pada kualitas LKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) menunjukkan bahwa efektivitas SPIP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amarini (2018) membuktikan bahwa secara simultan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Medan.

### **Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data koefisien pengaruh antara Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,616 satuan. Hal tersebut menunjukkan setiap perubahan 1 satuan variabel  $X_3$  (Kompetensi SDM) berpengaruh terhadap variabel  $Y$  (Kualitas Laporan Keuangan) signifikan.

Hasil pengujian regresi linear parsial diperoleh persamaan  $\hat{Y} = 11,234 + 0,542X_3$ . Hal tersebut menunjukkan setiap perubahan 1 satuan variabel  $X_3$  (Kompetensi Sumber Daya Manusia) berpengaruh terhadap variabel  $Y$  (Kualitas Laporan Keuangan) sebesar 0,542 unit dengan konstanta 11,234. Pengujian hipotesis diperoleh bahwa nilai  $\text{Sig.} = 0,000$  dan  $t_{\text{hitung}} = 5,243$  sedangkan  $t_{\text{tabel}} =$

1,67. Karena nilai Sig. < 0,05 dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh signifikan variabel bebas  $X_3$  terhadap Y

Hasil penelitian tersebut searah dengan penelitian Pilander (2018) yang menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Kotamobagu. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yensi (2014) menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Secara simultan koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,748 satuan. Hal ini berarti terdapat pengaruh variabel bebas  $X_1$  (Penerapan SAP),  $X_2$  (Efektivitas SPIP), dan  $X_3$  (Kompetensi SDM) secara simultan terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan) signifikan.

Analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi  $\hat{Y} = 3,167 + 0,218.X_1 + 0,108.X_2 + 0,274.X_3 + e$ . Nilai koefisien regresi sebesar 0,218, 0,108, dan 0,274 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel bebas  $X_1$  (Penerapan SAP),  $X_2$  (Efektivitas SPIP), dan  $X_3$  (Kompetensi SDM) secara simultan terhadap variabel terikat Y (Kualitas Laporan Keuangan). Pengujian signifikansi koefisien regresi signifikan ditunjukkan oleh nilai Sig. = 0,000 dan  $F_{hitung} = 18,207$  sedangkan  $F_{tabel} = 3,91$ . Sehingga nilai Sig. < 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau regresi tersebut signifikan, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel bebas  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  terhadap Y secara simultan.

Hasil penelitian searah dengan hipotesis penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan Penerapan SAP, Efektivitas SPIP, dan Kompetensi SDM secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya dengan Penerapan SAP, Efektivitas SPIP, dan peningkatan Kompetensi SDM akan berpengaruh pada meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel bebas  $X_1$  (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan), variabel  $X_2$  (Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dan variabel  $X_3$  (Kompetensi Sumber Daya Manusia) terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan) secara parsial dan simultan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu khususnya penelitian yang dilakukan di organisasi Pemerintah terhadap variabel yang diteliti.

Penelitian ini mengambil sampel di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan fenomena diatas. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk objek penelitian yang lebih luas guna membuktikan keterkaitan antar variabel. Disamping itu pula penelitian dengan subjek kualitas laporan keuangan dapat dikombinasikan dengan data sekunder atau tambahan variabel lain yang memungkinkan mempengaruhi variabel terikat. Model penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam faktor yang menyebabkan turunnya kualitas laporan keuangan disuatu organisasi atau entitas. Diharapkan dengan adanya metode penelitian lain dapat memberikan variasi atau dukungan terhadap hasil penelitian sebelumnya dengan subjek yang sama.

### **REFERENSI**

- Anggraini, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.
- Amarini, N. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.

- Ikatan Akuntansi Indonesia.(2015). *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan - Edisi Revisi*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT Raja Grafindo.
- Indriasih, Dewi. (2014). *The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government*. *Research Journal of Finance and Accounting*.ISSN 222-1697 (Paper) ISSN 222-2847 (Online) Vol. 5, No. 20.
- Lestari, S. D. (2015). Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Provinsi Jawa Barat*) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Mahmudi.(2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Munasyir. 2015. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Aceh Utara*. *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol. 4, No. 4, November 2015. Pascaserjana Syiah Kuala: Aceh.
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, "Goodwill"*, 9(2)
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Ramdany.(2017). *Effectiveness of Internal Control, Good Governance and Accounting Information Quality on Budgetary Discipline*. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 12, Issue 1 (April).
- Ramdany., Winwin Yadiati. (2017b). *Budgetary Discipline and Factors That Influence It*. *Risk mulyanGovernance and Control: Financial Markets & Institutions*, 8(1), 49-58
- Ratnasari, R., & Suratman, H. S. S. (2018).Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Survei pada Pemerintah Daerah Kota Bandung*) (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Republik Indonesia.*Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia.*Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.
- Republik Indonesia.*Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia.*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia.*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)*.
- Ruki, Ahmad. (2003). *Manajemen Penggajian dan Pengupahan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Simanjuntak.(2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Soimah, S. (2014).*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Sudarmanto.(2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Edisi Tiga. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015).Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar

- Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Udiyanti, dkk. (2014). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*. eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 2 No. 1.
- Yensi, H. (2014). Anisma. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)*. *JOM FEKON*, 1(1).
- Jurnal Online Fakultas Ekonomi, Universitas Riau. Vol 1, No 2.
- Wahyono. (2014). *Sistem Informasi, Konsep Dasar, Analisa Desain dan Implementasi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

**Website:**

<https://kkp.go.id>

[https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2017/lkpp\\_2017\\_1527749827.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2017/lkpp_2017_1527749827.pdf)

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tiga-isu-utama-sdm-indonesia-dalam-angkatan-kerja/>